

Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

Olis Bawode^{1*}, Arifin Tahir², Yacob Noho Nani³

¹⁻³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis korespondensi: olisbawode03@gmail.com¹

Abstract. *The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is a government policy aimed at reducing the expenditure burden of poor households through the provision of food assistance in non-cash form. However, its implementation at the village level still faces various challenges. This study aims to analyze the effectiveness of the BPNT Program in Tolotio Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, and to identify the factors influencing its implementation. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving village government officials, the Social Affairs Office, BPNT facilitators, and beneficiary communities. The results indicate that the implementation of BPNT in Tolotio Village is relatively effective in supporting food needs and enhancing the independence of Beneficiary Families (KPM). Nevertheless, several issues remain, including inaccurate targeting of beneficiaries, limited technological literacy, and insufficient transparency and updating of beneficiary data. The factors affecting program effectiveness include the availability of implementing resources, the support of physical facilities and technology, the effectiveness of communication among stakeholders, and the level of community acceptance and response. The findings imply the need for regular data updating, improved socialization, and strengthened coordination and supervision to ensure that the BPNT Program is implemented more fairly, accurately targeted, and sustainably.*

Keywords: *Beneficiary Families; Non-Cash Assistance; Policy Communication; Program Effectiveness; Targeting Accuracy*

Abstrak. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara non-tunai. Namun, efektivitas pelaksanaannya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program BPNT di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah desa, Dinas Sosial, pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT di Desa Tolotio tergolong cukup efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan memberikan kemandirian kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan literasi teknologi, serta lemahnya transparansi dan pembaruan data penerima bantuan. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program meliputi ketersediaan sumber daya pelaksana, dukungan sarana fisik dan teknologi, efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan, serta tingkat penerimaan dan respons masyarakat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala, peningkatan sosialisasi, serta penguatan koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan Program BPNT dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Bantuan Non Tunai; Efektivitas Program; Keluarga Penerima Manfaat; Ketepatan Sasaran; Komunikasi Kebijakan

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan mendasar di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Gorontalo. Kondisi keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan yang layak dan bergizi. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah

melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini dirancang untuk membantu rumah tangga miskin melalui pemberian bantuan pangan dalam bentuk saldo non-tunai yang dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan, ketepatan sasaran, serta transparansi dan efisiensi penyaluran bantuan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Program BPNT di berbagai daerah memberikan dampak positif dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Namun demikian, berbagai studi juga mengungkapkan bahwa efektivitas program ini belum sepenuhnya optimal. Permasalahan yang sering ditemukan meliputi ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya pembaruan data penerima manfaat, keterbatasan literasi teknologi masyarakat, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan BPNT tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat desa.

Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, merupakan wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian dan pekerjaan informal, sehingga rentan terhadap fluktuasi pendapatan dan kemiskinan. Program BPNT memiliki peran strategis sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat desa ini. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti adanya penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria, sementara sebagian masyarakat yang lebih membutuhkan belum terakomodasi, serta adanya transaksi bantuan yang tidak dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan pemahaman terhadap sistem non-tunai.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas Program BPNT yang tidak hanya menilai pencapaian tujuan program, tetapi juga mengkaji integritas dan kemampuan adaptasi program terhadap perubahan regulasi dan kondisi sosial masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini secara komprehensif mengidentifikasi faktor-faktor penentu efektivitas BPNT, meliputi ketersediaan sumber daya pelaksana, dukungan sarana fisik dan teknologi, efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan, serta tingkat penerimaan dan respons masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan BPNT di tingkat desa serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program bantuan pangan di masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio, Kecamatan

Tibawa, Kabupaten Gorontalo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik dan pengelolaan kegiatan pemerintahan. Secara lebih spesifik, administrasi publik mencakup berbagai aktivitas dalam organisasi pemerintah yang berfokus pada penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas eksekutif dan legislatif. Aktivitas tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap inisiatif pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Phelps, 2022).

Administrasi publik juga merujuk pada proses, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola serta melaksanakan keputusan-keputusan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, administrasi publik melibatkan pengelolaan sumber daya publik, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyediaan layanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan kebijakan yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif dan efisien (Hall, 2021).

Menurut Pasolong (2019), fungsi administrasi publik dalam masyarakat antara lain membantu menjamin hak-hak dasar warga (misalnya hak atas kepemilikan dan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial) dan mendorong distribusi pendapatan nasional yang lebih adil dan merata.

Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat. Kebijakan ini mencakup penyusunan program, alokasi sumber daya, serta pembuatan regulasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu bagi kesejahteraan umum. Kebijakan publik merupakan respons pemerintah terhadap isu politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi negara, serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan aspirasi masyarakat, kekuatan politik, dan pertimbangan ekonomi (Michael, 2021).

Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik umumnya dimulai dari identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat, dilanjutkan perumusan tujuan kebijakan, penyusunan dan analisis alternatif

kebijakan, serta pemilihan solusi yang paling tepat. Tahap berikutnya adalah implementasi yang melibatkan lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait melalui program, regulasi, distribusi sumber daya, dan layanan publik. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi hambatan/kelemahan, dan menjadi dasar perbaikan atau pembaruan kebijakan (Hill, 2023).

Efektivitas

Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan pencapaian tujuan tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dialokasikan secara tepat. Efektivitas dicirikan oleh hubungan proporsional antara hasil dan tujuan; semakin tinggi keluaran yang mampu memenuhi tujuan, maka program atau kegiatan dinilai semakin berhasil (Farida et al., 2022).

Efektivitas juga mencerminkan kualitas kinerja, yaitu sejauh mana hasil yang dicapai sesuai rencana, target waktu, anggaran, dan standar mutu. Dengan demikian, efektivitas berarti melakukan sesuatu dengan cara yang benar agar tujuan yang diharapkan tercapai (Lestari et al., 2023).

Efektivitas Program

Efektivitas program merujuk pada sejauh mana tujuan program/kebijakan tercapai secara optimal sesuai standar atau harapan. Efektivitas tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menilai kualitas proses pencapaian hasil, termasuk efisiensi dan pemanfaatan sumber daya (Pratiwi et al., 2021).

Dalam konteks BPNT, efektivitas tercermin dari kapasitas program dalam memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan gizi secara berkelanjutan. BPNT dirancang sebagai respons atas kebutuhan akses pangan layak bagi rumah tangga miskin, dan diberikan dalam bentuk nontunai agar lebih tepat sasaran serta lebih praktis dibanding bantuan tunai (Hermawan et al., 2021).

BPNT disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara lebih berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (Hendra, 2020; Kementerian Sosial, 2020).

Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas dapat ditinjau melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan mencakup aspek kerangka waktu, target, serta dukungan kerangka hukum. Integrasi menggambarkan kemampuan organisasi membangun kerja sama dan komunikasi,

termasuk prosedur dan proses sosialisasi. Adaptasi menunjukkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan, ditandai peningkatan kapasitas serta dukungan sarana-prasarana (Anggraini & Tuah, 2017).

Faktor-Faktor Penentu Efektivitas BPNT

Efektivitas BPNT tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya, dukungan infrastruktur, komunikasi, serta penerimaan masyarakat (Hermawan et al., 2021; Habibah et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), termasuk dinamika, kendala, dan persepsi pelaksana serta penerima manfaat. Penelitian dilaksanakan di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo selama kurang lebih enam bulan, dengan pertimbangan karakteristik sosial ekonomi masyarakat penerima BPNT yang beragam. Informan penelitian dipilih secara purposive sebanyak sepuluh orang yang terdiri atas unsur Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping BPNT, dan masyarakat penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama, serta bersumber dari data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Efektivitas pelaksanaan Program BPNT di Desa Tolotio dianalisis berdasarkan tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio menunjukkan bahwa program ini telah menjalankan fungsi perlindungan sosial dengan membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memenuhi kebutuhan pangan dasar. Penyaluran bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memberikan akses yang lebih terjamin terhadap bahan pangan pokok serta mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga dan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kharisma et al. (2025) yang menunjukkan bahwa BPNT berkontribusi positif terhadap

peningkatan ketahanan pangan dan variasi konsumsi pada rumah tangga berpengeluaran rendah.

Meskipun demikian, efektivitas program dari aspek ketepatan sasaran dan keadilan distribusi masih belum optimal. Temuan lapangan menunjukkan adanya kesalahan inklusi dan eksklusi penerima, yang menandakan bahwa keberhasilan BPNT sangat bergantung pada kualitas tata kelola data dan mekanisme pemutakhiran DTKS/KPM. Sanah (2021) dan Banerjee et al. (2023) menegaskan bahwa akurasi penargetan merupakan prasyarat utama agar bantuan non-tunai memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal dan meminimalkan potensi ketidakpuasan sosial.

Selain ketepatan sasaran, daya beli riil bantuan di tingkat lokal turut memengaruhi pencapaian tujuan BPNT. Variasi harga pangan antar wilayah menyebabkan perbedaan kemampuan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga penerima, sebagaimana dikemukakan oleh Tangkudung dan Nasrudin (2025). Oleh karena itu, evaluasi pencapaian tujuan BPNT di Desa Tolotio perlu mempertimbangkan secara simultan ketepatan sasaran, kualitas implementasi, serta daya beli dan akses pangan agar manfaat program terealisasi secara substantif (Tahir, 2012).

Integrasi Antar Pelaksana Program

Integrasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio tercermin dari kerja sama antara Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping BPNT, serta agen penyalur atau e-warong. Koordinasi antar pelaksana telah berjalan, khususnya dalam proses pendataan, penyaluran bantuan, dan sosialisasi kepada perangkat desa serta masyarakat penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural aktor-aktor pelaksana telah terhubung dalam satu sistem implementasi kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh Wahyuni dan Prabowo (2021).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum sepenuhnya optimal dari sisi kualitas komunikasi dan koordinasi substantif. Komunikasi antar pihak terkait masih bersifat administratif dan belum didukung mekanisme evaluasi bersama yang rutin dan partisipatif, sehingga penanganan keluhan masyarakat dan pembaruan data penerima manfaat sering mengalami keterlambatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman, Hidayat, dan Sari (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya komunikasi substantif dan minimnya forum koordinasi lintas aktor menjadi penghambat utama efektivitas program bantuan sosial.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, integrasi tidak hanya dimaknai sebagai adanya hubungan kerja formal, tetapi juga kemampuan pelaksana membangun komunikasi

responsif, berbagi informasi, dan melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika lapangan. Nugroho dan Putri (2023) serta Dewi dan Kurniawan (2024) menegaskan bahwa integrasi yang kuat ditandai oleh evaluasi rutin, mekanisme umpan balik masyarakat, dan koordinasi lintas sektor yang adaptif. Oleh karena itu, penguatan komunikasi substantif, evaluasi berkala, serta pengawasan partisipatif dan akuntabilitas pelaksana menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan BPNT di Desa Tolotio (Nani et al., 2024).

Adaptasi Program terhadap Kondisi Lingkungan

Adaptasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio berkaitan dengan kemampuan pelaksana dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menyesuaikan diri terhadap sistem bantuan berbasis non-tunai dan dinamika pelaksanaan di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KPM telah mampu menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk bertransaksi di e-warong, yang menandakan adanya proses pembelajaran dan penyesuaian terhadap mekanisme penyaluran bantuan. Temuan ini sejalan dengan Suryani dan Hartono (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan adaptasi kebijakan bantuan non-tunai sangat dipengaruhi oleh kapasitas penerima manfaat dalam memahami prosedur dan teknologi yang digunakan.

Namun demikian, proses adaptasi tersebut belum berlangsung secara merata di seluruh kelompok penerima. KPM lanjut usia dan masyarakat dengan tingkat literasi teknologi yang rendah masih mengalami kesulitan dalam menggunakan KKS dan memahami mekanisme BPNT, sehingga meningkatkan ketergantungan pada pendamping dan agen penyalur. Kondisi ini sejalan dengan temuan Lestari dan Wibowo (2022) yang menegaskan bahwa rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama adaptasi program bantuan sosial berbasis teknologi di wilayah pedesaan.

Selain faktor penerima manfaat, adaptasi program juga ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam merespons perubahan dan permasalahan di lapangan. Prasetyo, Mulyadi, dan Anwar (2023) serta Nugraha dan Sari (2024) menekankan bahwa adaptasi kebijakan yang efektif memerlukan fleksibilitas pelaksana, dukungan sarana teknologi, dan mekanisme pembelajaran berkelanjutan agar kepercayaan masyarakat terhadap program tetap terjaga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan pendamping, penyederhanaan informasi program, serta perbaikan dukungan teknologi menjadi langkah penting untuk memastikan adaptasi BPNT di Desa Tolotio berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan pula oleh Isa (2009).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program BPNT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program BPNT di Desa Tolotio dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut.

Ketersediaan Sumber Daya Pelaksana

Ketersediaan sumber daya pelaksana yang meliputi sumber daya manusia, finansial, dan logistik merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah pendamping dan aparat pelaksana berdampak pada belum optimalnya pengawasan serta pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Temuan ini sejalan dengan Safitri dan Rodiyah (2022) yang menegaskan bahwa aspek sumber daya, khususnya kapasitas dan kecukupan petugas pelaksana, menjadi faktor penentu efektivitas implementasi BPNT di tingkat lokal.

Pada dimensi logistik dan dukungan teknologi, hambatan implementasi muncul ketika perangkat transaksi dan tata kelola layanan tidak berjalan stabil. Gangguan mesin EDC, kendala saldo bantuan, serta keterlambatan jadwal pencairan berpengaruh terhadap kelancaran layanan dan persepsi masyarakat terhadap efektivitas program (Safitri & Rodiyah, 2022; Ristanti & Fadhli, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana logistik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan e-warong, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur transaksi dan ketepatan operasional layanan di lapangan.

Di sisi lain, dukungan anggaran dari APBN pada prinsipnya telah tersedia, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola implementasi di tingkat lokal. Sulistyowati, Tyas, dkk. (2024) serta Alfian dan Agustina (2022) menekankan pentingnya monitoring, evaluasi, dan penguatan kapasitas pelaksana agar program berjalan berkelanjutan dan akuntabel. Sejalan dengan itu, Mozin dkk. (2021) menegaskan bahwa kejelasan struktur birokrasi dan standar operasional prosedur menjadi prasyarat penting untuk memperlancar koordinasi lintas pelaksana sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mencapai tujuan kebijakan.

Sarana Fisik dan Teknologi

Sarana fisik dan teknologi seperti e-warong, mesin EDC, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan komponen kunci yang menentukan kelancaran layanan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah e-warong serta gangguan teknis pada mesin EDC berdampak langsung pada kenyamanan dan kemudahan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memanfaatkan bantuan. Temuan ini sejalan dengan Oktavia dan Djamaluddin (2023) yang menegaskan bahwa

aksesibilitas e-warong, termasuk jarak dan ketersediaan titik layanan, memengaruhi pengalaman penerima dalam memanfaatkan BPNT berbasis KKS.

Selain keterbatasan e-warong, hambatan teknis pada mesin EDC menunjukkan bahwa efektivitas BPNT sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur transaksi dan stabilitas layanan. Fajar dan Rodiyah (2022) menunjukkan bahwa keterlambatan layanan dan antrean di e-warong sering terjadi ketika dukungan fasilitas dan prosedur operasional belum berjalan optimal, sehingga tujuan program terhambat pada level implementasi. Hal ini selaras dengan temuan Waryadi dan Hanriana (2022) yang menekankan bahwa pelaksanaan BPNT memerlukan dukungan fasilitas dan pengelolaan layanan yang konsisten agar penerima tidak mengalami kebingungan dan ketidakpastian.

Dalam konteks yang lebih luas, persoalan sarana fisik dan teknologi tidak hanya berdampak pada efisiensi layanan, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan program. Ariesta dan Nugroho (2023) mencatat bahwa kendala implementasi BPNT di tingkat lokal kerap berkaitan dengan masalah e-warong, keterlambatan penyaluran, dan aspek administratif. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan akses e-warong, perbaikan keandalan mesin EDC, serta penguatan dukungan teknis dan prosedur layanan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemudahan akses KPM dan efektivitas BPNT di Desa Tolotio.

Efektivitas Komunikasi dan Komitmen Pelaksana

Efektivitas komunikasi dan komitmen pelaksana merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio. Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan meliputi Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping BPNT, agen penyalur (e-warong), dan mitra terkait berperan penting dalam menyamakan pemahaman mengenai tujuan, mekanisme, dan penyelesaian permasalahan program. Engkus (2020) menegaskan bahwa komunikasi kebijakan yang jelas, terbuka, dan berkelanjutan menjadi elemen penting untuk mencegah kesalahpahaman informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas komunikasi dan evaluasi bersama antar pelaksana di Desa Tolotio masih terbatas. Komunikasi yang terbangun cenderung bersifat administratif dan belum disertai forum evaluasi rutin yang mampu merespons permasalahan secara cepat dan tepat, sehingga berdampak pada lambatnya penanganan keluhan masyarakat dan pembaruan data penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan Fajar dan Rodiyah (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya komunikasi substantif dan rendahnya koordinasi antar pelaksana dapat menghambat efektivitas pelaksanaan BPNT.

Selain komunikasi, komitmen pelaksana juga menjadi determinan penting dalam efektivitas program. Putra dkk. (2022) menunjukkan bahwa komitmen implementor dalam menjalankan tugas, menjaga ketepatan waktu, dan merespons keluhan masyarakat sangat memengaruhi kelancaran penyaluran bantuan dan kualitas layanan. Prasetyo dkk. (2023) menegaskan bahwa komitmen tersebut perlu ditunjang dengan mekanisme evaluasi berkelanjutan dan pembagian peran yang jelas agar permasalahan implementasi dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga tujuan BPNT dapat tercapai secara optimal di Desa Tolotio.

Tingkat Penerimaan dan Respons Masyarakat

Tingkat penerimaan dan respons masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio tergolong cukup baik, yang tercermin dari pemanfaatan bantuan secara aktif oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Masyarakat merasakan manfaat langsung dari bantuan yang diterima, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan Sakinah (2022) yang menyatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap program bantuan pangan cenderung positif apabila bantuan tersebut relevan dengan kebutuhan dasar dan memberikan manfaat nyata.

Namun demikian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan BPNT di Desa Tolotio belum sepenuhnya merata. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan penerima manfaat masih dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, kualitas bahan pangan yang diterima, serta kemudahan akses terhadap agen penyalur atau e-warong. Kondisi ini sejalan dengan temuan Habibah dkk. (2023) yang menegaskan bahwa keadilan distribusi dan kualitas komoditas pangan menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberhasilan BPNT.

Selain kualitas dan ketepatan sasaran, respons masyarakat juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam mengakses layanan program. Fauzan dkk. (2024) menegaskan bahwa kemudahan akses layanan dan kejelasan informasi program berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap bantuan sosial. Sejalan dengan itu, Dante (2022) menunjukkan bahwa respons positif masyarakat akan semakin menguat apabila program bantuan sosial mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga, sehingga perbaikan kualitas layanan dan akses menjadi faktor penting dalam memperkuat penerimaan BPNT di Desa Tolotio.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo pada dasarnya telah menjalankan fungsi perlindungan sosial dengan membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memenuhi kebutuhan pangan dasar dan meringankan beban pengeluaran rumah tangga, namun efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Pencapaian tujuan masih terkendala oleh ketepatan sasaran akibat keterbatasan pemutakhiran data penerima manfaat, integrasi antar pelaksana yang masih bersifat administratif sehingga respons keluhan dan pembaruan data berjalan lambat, keterbatasan adaptasi sebagian KPM terhadap mekanisme non-tunai terutama pada kelompok lanjut usia, serta kendala sarana fisik dan teknologi seperti keterbatasan e-warong dan gangguan mesin EDC, yang diperparah oleh belum memadainya jumlah dan intensitas pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data KPM berbasis desa, peningkatan kualitas integrasi melalui komunikasi substantif dan evaluasi rutin lintas pelaksana, penguatan adaptasi melalui peningkatan literasi BPNT dan pendampingan berkelanjutan bagi kelompok rentan, serta perbaikan sarana fisik dan teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya pelaksana yang diiringi monitoring dan evaluasi yang konsisten agar dukungan anggaran berdampak optimal di tingkat lokal. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang terbatas dan pendekatan kualitatif yang menekankan konteks lokal, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati, dan penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi kajian, mengombinasikan pendekatan kualitatif–kuantitatif, serta memasukkan analisis daya beli bantuan dan kualitas komoditas lintas wilayah untuk memperoleh gambaran evaluasi BPNT yang lebih komprehensif dan komparatif.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, Y., & Agustina, C. I. (2022). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendampingan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal JISI POL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 6(3), 57–78.
- Anggraini, D., & Tuah, N. (2017). Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–125.
- Ariesta, H., & Nugroho, F. (2023). Implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dalam rangka pengatasan kemiskinan di era COVID-19. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v24i1.1004>
- Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Satriawan, E., & Sumarto, S. (2023). Electronic food vouchers: Evidence from an at-scale experiment in Indonesia. *American Economic*

- Review, 113(2), 514–547. <https://doi.org/10.1257/aer.20210461>
- Dante, R. (2022). Social assistance programs and community response: Evidence from food aid beneficiaries. *Journal of Social Welfare Studies*, 14(2), 112–126. <https://doi.org/10.1080/21642850.2022.2031457>
- Dewi, R. K., & Kurniawan, A. (2024). Inter-organizational coordination in social assistance programs at the village level. *Journal of Social Policy and Administration*, 8(1), 45–59. <https://doi.org/10.20473/jspa.v8i1.2024>
- Engkus. (2020). Komunikasi kebijakan bantuan pangan nontunai melalui e-warong. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1), 47–60. <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677>
- Fajar, A., & Rodiyah, I. (2022). Implementation of e-warong program. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20, Article 1283. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1283>
- Farida, I., Rahman, A., & Putri, D. (2022). Efektivitas organisasi dan kinerja pelayanan publik. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–58.
- Fauzan, M., Budiman, A., & Noorrahman, A. (2024). Public satisfaction and accessibility in non-cash social assistance programs. *Journal of Public Service Quality*, 9(1), 41–55. <https://doi.org/10.31289/jpsq.v9i1.2024>
- Habibah, S., Anjasmari, R., & Husaini, A. (2023). Community perception of non-cash food assistance implementation in rural areas. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 18(3), 201–215. <https://doi.org/10.7454/jks.v18i3.2023>
- Hall, R. H. (2021). *Public administration: Theory and practice* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Hendra. (2020). Implementasi program bantuan pangan non-tunai dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 14(2), 89–102.
- Hermawan, A., Izzaty, R. E., Budiyan, S., Sari, D., Sudarwati, & Teja, M. (2021). Evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 155–170.
- Hill, M. (2023). *The public policy process* (9th ed.). London, UK: Routledge.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman umum program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kharisma, B., Wardhana, A., Remi, S. S., & Fathimah, D. I. (2025). Food security outcomes of Indonesia's non-cash food assistance program (BPNT) among lowest-expenditure households. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 14(2), 373–390. <https://doi.org/10.15408/sjie.v14i2.46203>
- Lestari, D., & Wibowo, A. (2022). Digital literacy challenges in non-cash social assistance programs in rural areas. *Journal of Rural Social Development*, 7(2), 101–115. <https://doi.org/10.22146/jrsd.v7i2.67890>
- Michael, J. (2021). *Public policy analysis: Concepts and practices*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Mozin, S. Y., Idrus, A. F., & Anwar, S. (2021, December). The Implementation of Regional Regulation of Gorontalo City Number 17 Of 2011 Concerning The Retribution of Market Services in Gorontalo City. In *Proceedings of International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICSDGs)* (Vol. 4, No. 1, pp. 63-73).
- Nani, Y. N., Abdussamad, Z., Elyta, E., & Tohopi, R. (2024, January). NPA, the New Paradigm

- of Public Service Overview of Public Policy Implementation. In *2nd International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST 2023)* (pp. 148-154). Atlantis Press.
- Nugraha, R., & Sari, P. N. (2024). Policy adaptability and public trust in social assistance programs. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 12(1), 33–47. <https://doi.org/10.7176/PPAR/12-1-04>
- Nugroho, R., & Putri, D. A. (2023). Collaborative governance in the implementation of social protection programs in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(2), 179–195. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i2.15942>
- Oktavia, S., & Djamaluddin, S. (2023). The effect of e-warong accessibility on household consumption. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(6). <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i6.267>
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Phelps, J. (2022). *Foundations of public administration*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Prasetyo, E., Mulyadi, D., & Anwar, K. (2023). Adaptive governance in the implementation of social protection policies. *Journal of Governance Studies*, 9(3), 245–260. <https://doi.org/10.31219/jgs.v9i3.1456>
- Prasetyo, R., Hendra, & Iqbal, M. (2023). Rekomendasi kebijakan: Evaluasi BPNT dan Program Sembako. *SHARE: Social Work Journal*, 12(1), 85–98. <https://doi.org/10.33019/share.v12i1.356>
- Pratiwi, N., Suryani, D., & Kurniawan, A. (2021). Efektivitas program publik berbasis kesejahteraan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 201–214.
- Putra, R. E., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2022). Implementasi kebijakan penyaluran BPNT melalui e-warong versus PT Pos Indonesia di Kota Padang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 266–280. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.4932>
- Rahman, A., Hidayat, R., & Sari, M. (2022). Policy communication and coordination challenges in social assistance implementation. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 287–301. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2022.019.03.6>
- Ristanti, E. Y., & Fadhli, K. (2022). Analisis implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen)*, 6(2), 21–?. <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v6i2.2590>
- Safitri, N. R. Y., & Rodiyah, I. (2022). Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20, Article 1278. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1278>
- Sakinah, N. (2022). Penerimaan masyarakat terhadap program bantuan pangan nontunai di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 23(1), 67–81. <https://doi.org/10.7454/jiks.v23i1.2022>
- Sanah, H. (2021). Efektivitas program bantuan pangan nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1). <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.2237>
- Sulistyowati, F., Tyas, B. H. S. N., Widati, W., & Puspitosari, C. (2024). Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13(3), 214–224. <https://doi.org/10.33007/ska.v13i3.3389>

- Suryani, N., & Hartono, B. (2021). Policy adaptation in the implementation of non-cash social assistance programs. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 89–103. <https://doi.org/10.20473/japks.v6i2.2021>
- Tahir, A. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo*. Tarumanagara University.
- Tangkudung, S. N., & Nasrudin, R. (2025). The purchasing power of non-cash food assistance and household food security in Indonesia. *World Development Perspectives*, 40, 100748. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2025.100748>
- Wahyuni, S., & Prabowo, A. (2021). Inter-agency coordination in poverty alleviation programs at the local government level. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 134–148. <https://doi.org/10.30595/jian.v9i2.11234>
- Waryadi, H., & Hanriana, N. (2022). Implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui e-warong di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 6(2), 175–201. <https://doi.org/10.37949/jdp.v6i2.7>